



## KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

### SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

NOMOR: SDM-SM.02.03-011739

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama	:	Yongki Adhiprakasa
NIP/NRP	:	81071341
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Jakarta, 01 Juli 1981
Pangkat/Golongan Ruang	:	KOMPOL, -
Jabatan	:	Kanit 2 Subdit V
Instansi/Unit Kerja	:	Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri
Kualifikasi	:	MEMUASKAN

## LULUS

pada *Training of Facilitator Implementasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan III Tahun Anggaran 2025* yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025 di Depok yang meliputi 80 jam pelajaran.

Depok, 25 Juni 2025  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

## DAFTAR MATA PELATIHAN

1. Overview Kampus Pengayoman Pancasila (3 JP);
2. Overview *Training Of Facilitator* Implementasi KUHP (3 JP);
3. Ceramah : Pembinaan Ideologi Pancasila (2 JP);
4. Building Learning Commitment (BLC) (3 JP);
5. Sejarah KUHP di Indonesia (4 JP);
6. Subjek Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP baru (4 JP);
7. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Berekspresi dalam KUHP baru (4 JP);
8. Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan (4 JP);
9. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Pidana (4 JP);
10. Kesalahan, dan Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf dalam KUHP baru (4 JP);
11. Alasan Pemberat dan Peringatan Pidana (4 JP);
12. Gugurnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana (4 JP);
13. Tindak Pidana Kesusilaan (4 JP);
14. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (4 JP);
15. Tindak Pidana Khusus (4 JP);
16. Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (4 JP);
17. Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana (4 JP);
18. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (4 JP);
19. Mempertunjukkan alat pencegah Kehamilan, Alat Pengguguran Kandungan dan Aborsi (4 JP);
20. Tindak Pidana Melawan Hukum, Tindak Pidana Aduan dan Alasan Pemberat (4 JP);
21. Konsep dan Teknik Dasar Fasilitasi (5 JP).

Depok, 25 Juni 2025  
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan  
Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida